



LKIP

BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp. (0265) 543342 Faks (0265) 543340
Website : bappelitbangda.tasikmalayakab.go.id Email : bappelitbangda@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 007/PR.04.04/I/Bapp/2023

tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/735/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun

- 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaparna
pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



AHMAD MUKSIN, S.H., M.M.
NIP. 19630206 198703 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 007/PR.04.04/I/Bapp/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN
2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretaris : Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

4. Kepala Bidang Pendanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

7. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

8. Kepala Sub Bidang Statistik Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

10. Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Singaparna
pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



AHMAD MUKSIN, S.H., M.M.
NIP. 19630206 198703 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN
TASIKMALAYA
NOMOR : 007/PR.04.04/I/Bapp/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2022

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022

KETUA

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.

WAKIL KETUA

Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

SEKRETARIS

- Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022;
- Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

ANGGOTA

- Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022;

- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



AHMAD MUKSIN, S.H., M.M.

NIP. 19630206 198703 1 007

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Tahun 2022 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyampaian LKIP Tahun 2022 pada dasarnya menggambarkan Informasi Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) secara utuh selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2022, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan mengenai pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dalam periode Tahun 2022. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.



Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

Singaparna, 4 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



ANMAD MULSAN, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630206 198703 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	I-3
1.2. Struktur Organisasi	I-4
1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	I-7
1.4. Isu Aktual	I-10
1.5. Sistematika Penyusunan	I-11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. Perencanaan Strategis	II-1
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	II-2
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda	II-7
2.2. Perjanjian Kinerja	II-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Pengukuran Kinerja	III-1
3.1.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja	III-4
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022	III-6
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)	III-8



3.1.4.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi.....	III-9
3.1.5.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-10
3.1.6.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	III-11
3.2.	Realisasi Anggaran.....	III-37

BAB IV PENUTUP _____ **IV-1**



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	I-7
Tabel 1.2.	Komposisi PNS Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jabatan Tahun 2022	I-8
Tabel 1.3.	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022	I-8
Tabel 1.4.	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2022	I-9
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya	II-8
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	II-10
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022	II-11
Tabel 3.1.	Skala Penilaian	III-3
Tabel 3.2.	Capaian Target dan Realisasi Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022	III-4
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2021 - 2022	III-7
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 - 2022 dengan Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021 - 2026	III-8



Tabel 3.5.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Bappelitbangda Tahun 2022.....	III-10
Tabel 3.6.	Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	III-14
Tabel 3.7.	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.....	III-38
Tabel 4.1.	Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022.....	IV-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	I-6
-------------	--	-----



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Pepres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang kerkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi



pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tasikmalaya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2022.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tasikmalaya sebagai Perangkat Daerah utama yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Seiring dengan amanat untuk menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, sebagai entitas utama pelaksanaan perencanaan harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya, rumusan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban dimaksud adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam perencanaan pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan,



penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pengoordinasikan dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pembinaan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisa strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik;
- h. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas :

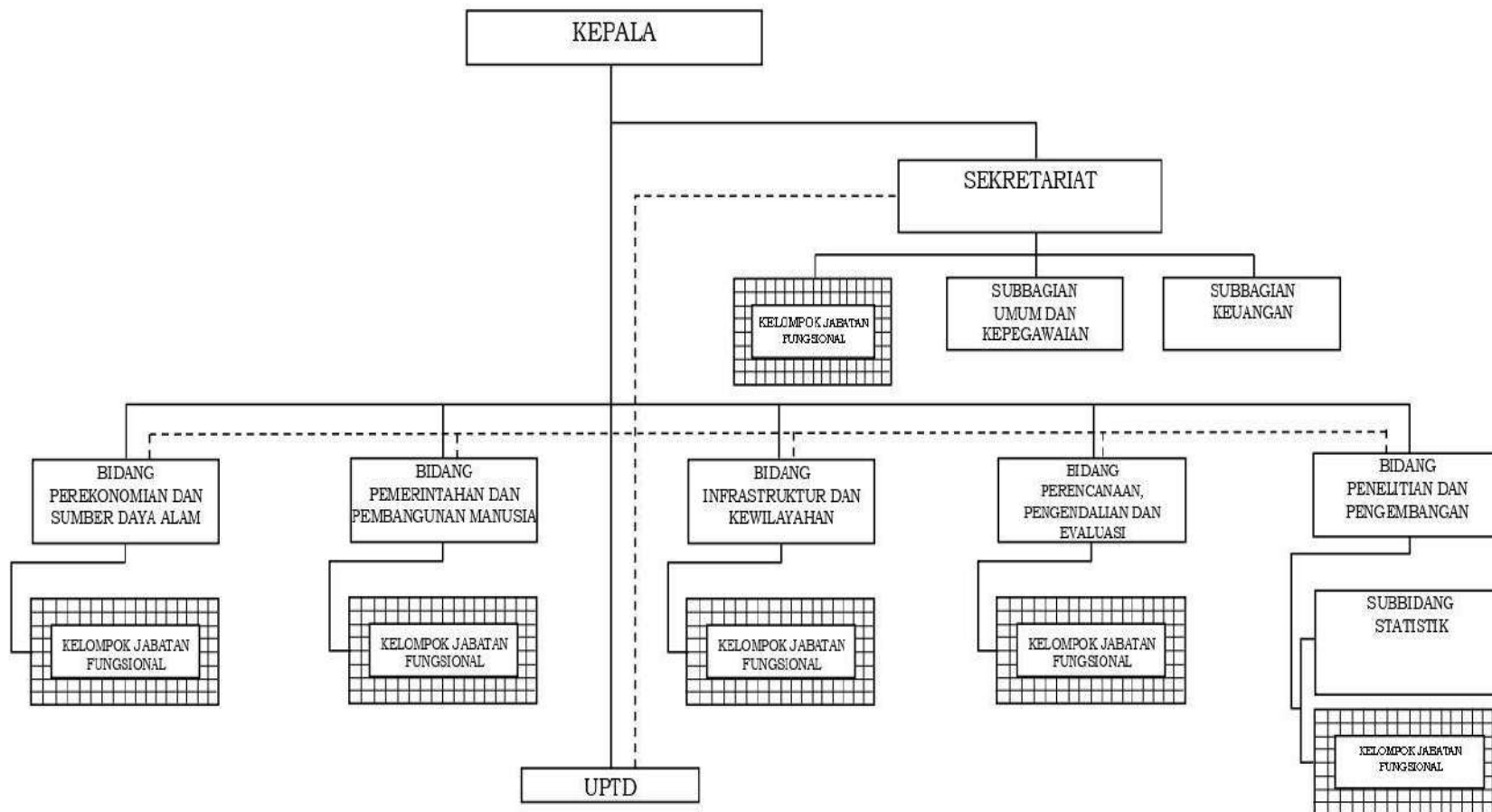
1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan



- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Statistik; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya**



1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 31 orang laki-laki atau 62% dan perempuan sebanyak 19 orang atau 38%, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Bappelitbangda	1	-	1
2	Sekretariat	9	6	15
3	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5	1	6
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6	1	7
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	5	6
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	3	4	7
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	6	2	8
Jumlah Total		31	19	50

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

2. Jabatan

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia, sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tabel 1.2.
Komposisi PNS Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Eselon I	0
2	Eselon II	1
3	Eselon III	5
4	Eselon IV	2
5	JFU	30
6	JFT	12
	Jumlah Total	50

Sumber : DUK Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

3. Jenjang Pendidikan

Komposisi jumlah pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S-3) tidak ada, Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 21 orang atau 42%, Sarjana dan Diploma sebanyak 25 orang atau 50%, dan sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 4 orang atau 8% seperti tertera ada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.3.
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							
			S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kepala Bappelitbangda	1	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	15	-	3	9	-	-	3	-	-
3	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6	-	5	1	-	-	-	-	-
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	7	-	5	2	-	-	-	-	-
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	-	3	2	-	-	1	-	-



NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							
			S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	7	-	2	5	-	-	-	-	-
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	8	-	2	6	-	-	-	-	-
Jumlah Total		50	-	21	25		-	4		-

Sumber : DUK Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

4. Pangkat dan Golongan

Apabila melihat persebaran pegawai berdasarkan pangkat dan golongannya dapat dilihat bahwa Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya memiliki pegawai yang memiliki golongan rata-rata cukup tinggi, terlihat bahwa pegawai yang memiliki Golongan II sebanyak 3 orang, sedangkan pegawai yang memiliki Golongan IV sebanyak 7 orang dan Golongan III sebanyak 40 orang.

Tabel 1.4.
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2022

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG							
			IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kepala Bappelitbangda	1	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	15	-	-	-	4	4	1	4	2
3	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6	-	-	-	3	2	1	-	-
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	7	-	-	3	1	1	1	-	-
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	-	-	-	4	-	-	1	1
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	7	-	-	2	2	1	-	2	-
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	8	-	-	1	2	3	1	1	-
Jumlah Total		50	1	-	6	16	11	4	9	3

Sumber : DUK Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022



Keterangan : Jumlah pegawai tersebut belum termasuk Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Kerja Sukarelawan.

1.4. Isu Aktual

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Sebagaimana esensi dari tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yaitu menuntut seluruh stakeholder yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada hal-hal serupa dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi eksternal maupun internal.

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Bappelitbangda antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas SDM perencana pembangunan;
2. Belum optimalnya ketersediaan basis data sektoral untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
4. Peningkatan penelitian dan pengembangan dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah.



1.5. Sistematika Penyusunan

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.2. Struktur Organisasi
- 1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- 1.4. Isu Aktual
- 1.5. Sistematika Penyusunan

BAB. II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

BAB. IV. PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

2.1. Perencanaan Strategis

Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi komitmen Bappelitbangda dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan yang berkelanjutan, perumusan Renstra Bappelitbangda tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan



strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

"DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA".



Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam

bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda "Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak" yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah ta'awun, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersukusuku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (Ta'awun) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali, RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 V-2 diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata "Religius" dan "Islami". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius adalah bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan



kata serapan dari kata religion (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin religio yang berarti obligation/bond (kewajiban), reverence (menghormati, memuja, mentakzirkan), dan berakar dari kata religare yang artinya to bind (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, religius bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata "Islam" berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) 'Salm' (مسلم) (yang berarti damai; 2) Berasal dari kata (م) 'aslama' (سَلِمَ) (yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap "Sang Khaliq"; 3) Saliim' (سليم) (yang berarti bersih dan suci; 4) Salam' (سَلام) (yang berarti selamat dan sejahtera. Islam RPJMD Kab.Tasikmalaya Tahun 2021-2026 V-3 merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasihsayang bagi manusia maupun semesta (Rahmatan lil 'alamin).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, Religius/Islami merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan



pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir , lahirnya suatu masyarakat yang



penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan acuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk membangun Kabupaten Tasikmalaya, secara umum Bappelitbangda terkait langsung dengan misi kedua, yaitu Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional.



2.1.2. Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berkualitas;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung pembangunan daerah;
4. Mewujudkan Satudata sektoral Kabupaten Tasikmalaya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik.

Berikut tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :



**Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
1	Mewujudkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	Poin
2	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin
3	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%
4	Mewujudkan Satudata sektoral Kabupaten Tasikmalaya	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%

2.2. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Tasikmalaya) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah



komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan, dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada instansi/unit kerja pelaksanaannya.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan Anggaran atau DPA.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	56 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	24,05 Poin	- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan oleh Stakeholder	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	79%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.918.512.325
2	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.634.999.800
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.599.999.150
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	350.000.000
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.000.000
JUMLAH TOTAL		13.703.511.275

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	56 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	24,05 Poin	- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	79%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.533.736.721
2	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.546.402.800
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.468.786.350
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	347.900.000
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	175.000.000
JUMLAH TOTAL		14.071.825.871



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi

kinerja sasaran yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dalam penyusunan LKIP ini dilakukan dengan mengolah data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data yang berasal dari dua sumber yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang berasal dari Sistem Informasi yang ada pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya baik laporan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan maupun laporan kegiatan lainnya yang bersifat insidental, sedangkan data eksternal berasal dari Dinas/Instansi terkait dan masyarakat.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap sasaran harus menghasilkan kinerja yang terukur. Kinerja sasaran adalah hasil yang diperoleh atas implementasi suatu sasaran yang dilakukan secara penjabarannya sampai ke taraf kegiatan, Tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah dengan mengukur capaian atas target berdasarkan indikasi yang ditentukan. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian

sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik,

maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{Re\ alisasi}{Re\ ncana} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{Re\ ncana - (Re\ alisasi - Re\ ncana)}{Re\ ncana} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian :

Tabel 3.1.
Skala Penilaian

No	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	> 80	Sangat Baik	Green
2	60 - 79,9	Baik	Blue
3	50 - 59,9	Sedang	Yellow
4	0 - 49,9	Kurang	Red
5	0	Tidak Lengkap	Grey

Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Bappelitbangda
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	56 Poin	59,41 Poin	106,08%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	24,05 Poin	24,05* Poin	100%
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelibngan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	79%	83,33%	105,48%

Ket: *Capaian Sementara

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda tercapai atau melebihi target, dengan capaian kinerja 106,08 % dan pada indikator Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral, dengan capaian kinerja 105,48 %.

2. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten dan Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder, dengan capaian kinerja 100 %.

Sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda sebesar 59,41 poin dengan kategori CC (Cukup). Hasil akhir capaian indeks reformasi birokrasi perangkat daerah dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya dan Biro Organisasi Propinsi Jawa Barat.

Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten yaitu sebesar 24,05 poin yang dinyatakan dalam predikat B, artinya akuntabilitas perencanaan kerjanya baik. Nilai Perencanaan Kinerja diperoleh dari hasil sementara nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Kemenpan RB pada bulan Maret 2023.

Sasaran yang ketiga yaitu meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan, pada tahun 2022 persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder yaitu sebesar 100%. Rumusan capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja}} \times 100\%$$

$$= \frac{2 \text{ kajian}}{2 \text{ kajian}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sasaran yang keempat yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik, pada tahun 2022 persentase ketersediaan data statistik sektoral yaitu sebesar 83,33% sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun ketersediaan data masih belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi dalam pemenuhan data statistik sektoral. Rumusan capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah ketersediaan urusan pada data statistik sektoral}}{\text{Jumlah semua urusan pada data statistik sektoral}} \times 100\%$$

$$= \frac{25 \text{ Urusan Pemerintah}}{30 \text{ Urusan Pemerintah}} \times 100\%$$

$$= 83,33\%$$

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 sebesar 102,89% (Sangat Baik), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Perhitungan rata-rata capaian sasaran adalah sebagai berikut :

$$(106,08\% + 100\% + 100\% + 105,48\%) / 4 = 102,89\%$$

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

Berikut disampaikan perbandingan capaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2021-2022 yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2021-2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	N/A	59,41 Poin
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	23,46 Poin	24,05* Poin
3	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	N/A	100%
4	Mewujudkan Satudata sektoral Kabupaten Tasikmalaya	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	71%	83,33%

Ket: *Capaian Sementara

Tingkat Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang ditunjukkan pada tabel diatas, dapat disampaikan bahwa indikator Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda dan Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada akhir tahun 2021 sesuai dengan dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah baru mulai dilakukan pada tahun 2022 ini. Pada indikator Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten mengalami kenaikan sebesar 0,59% dan Capaian Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral mengalami kenaikan sebesar 12,33%, hal ini dapat

disebabkan pada tahun 2022 adanya kenaikan target dibanding dengan tahun sebelumnya.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Berikut disampaikan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021-2022 dengan target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022
dengan Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Renstra	Realisasi 2022
1	Mewujudkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	N/A	56 Poin	59,41 Poin
2	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai Perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	23,46 poin	24,05 Poin	24,05* Poin
3	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas penelitian Dan pengembangan	Persentase hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Oleh Stakeholder	N/A	100%	100%
4	Mewujudkan Satudata sektoral Kabupaten Tasikmalaya	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	71%	79%	83,33%

Ket: *Capaian Sementara

Realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2022 dibandingkan dengan target Renstra, berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua indikator sasaran yang telah ditetapkan terealisasi dan telah mencapai target Renstra.

3.1.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk kinerja tahun 2022 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel berikut kami sajikan dalam sorting data untuk setiap sasaran yaitu :

- Sasaran pertama, Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Indikator yang mendukung sasaran pertama, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda pada tahun 2022 sebesar 59,41 poin.
- Sasaran Kedua, Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan. Indikator yang mendukung sasaran kedua, yaitu Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP sebesar 24,05 poin.
- Sasaran Ketiga, Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan. Indikator yang mendukung sasaran ketiga, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder sebesar 100%.
- Sasaran Keempat, Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik. Indikator yang mendukung sasaran keempat, yaitu Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral sebesar 83,33%.

Berdasarkan data, bahwa semua sasaran Bappelitbangda dapat dikatakan di tahun anggaran 2022 telah berhasil dicapai dan tepat sasaran

karena keempat indikator seluruhnya telah melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 maupun Renja Bappelitbangda Tahun 2022.

Keberhasilan beberapa indikator Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dari semua sasaran adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda dan seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sepanjang tahun anggaran 2022 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Bappelitbangda untuk Tahun Anggaran 2022 :

Tabel 3.5.
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
pada Bappelitbangda Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	106,08	93,06	13,06

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
	akuntabilitas kinerja perangkat daerah				
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	100	97,12	2,88
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder	100	95,04	4,96
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	105,48	99,62	5,86

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sepanjang Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat baik yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, semua target indikator telah tercapai.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 4 (empat) indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung

ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke empat indikator Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 14.071.825.871,-.

Berdasarkan data, tahun anggaran 2022 pada program kegiatan utama Bappelitbangda yang ditujukan untuk mencapai target kinerja keempat indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 14.071.825.871,- yang diserap Bappelitbangda sebesar Rp. 13.235.360.720,- (94,05%) atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 836.465.151,- (5,94%)

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2022 dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya rata-rata semua indikator realisasinya melampaui target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Kerjasama tim yang baik. Dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana kegiatan yang telah dibentuk berdasarkan rekomendasi pimpinan bermula dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
3. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Bappelitbangda Tahun Anggaran 2022.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2022 Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya :



Tabel 3.6.
Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	56 poin	59,41 poin	106,08%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.533.736.721	9.802.695.878	93,06
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.690.000	128.602.292	99,93
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.448.000	86.360.292	99,89
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.242.000	42.242.000	100
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.453.565.321	6.875.337.525	92,24
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.377.572.521	6.800.626.325	92,18
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.959.300	48.990.700	98,06

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.033.500	25.720.500	98,79
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	853.394.500	845.381.762	99,06
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.558.500	84.557.320	99,99
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.014.450	42.864.750	99,65
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.000.000	37.000.000	100
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.027.750	80.027.750	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	608.793.800	600.931.942	98,70
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	295.739.150	287.559.300	97,23
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	295.739.150	287.559.300	97,23
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.186.965.800	1.135.967.146	95,70
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	422.200.000	374.427.262	88,68

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	764.765.800	761.539.884	99,57
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.381.950	529.847.853	86,10
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	308.368.050	235.008.620	76,21
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.630.000	93.600.300	93,01
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.580.000	50.128.200	95,33
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.803.900	151.110.733	98,24
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	24,05 poin	24,05* poin	100%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.546.402.800	1.485.468.408	96,06
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	839.161.200	815.215.796	97,14

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	100.000.000	98.047.270	98,04
						Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	203.790.000	196.567.663	96,45
						Pelaksanaan Konsultasi Publik	74.500.000	73.146.000	98,18
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	169.465.200	164.960.914	97,34
						Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	34.859.900	33.850.279	97,10
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	256.546.100	248.643.670	96,92
						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	357.241.800	344.966.927	96,56
						Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000	137.725.127	91,81

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	207.241.800	207.241.800	100
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	349.999.800	325.285.685	92,93
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	200.000.000	191.809.187	95,90
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	149.999.800	133.476.498	88,98
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.468.786.350	1.442.211.476	98.19%
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	571.842.000	567.355.761	99.21%
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	228.187.000	225.517.989	98,83

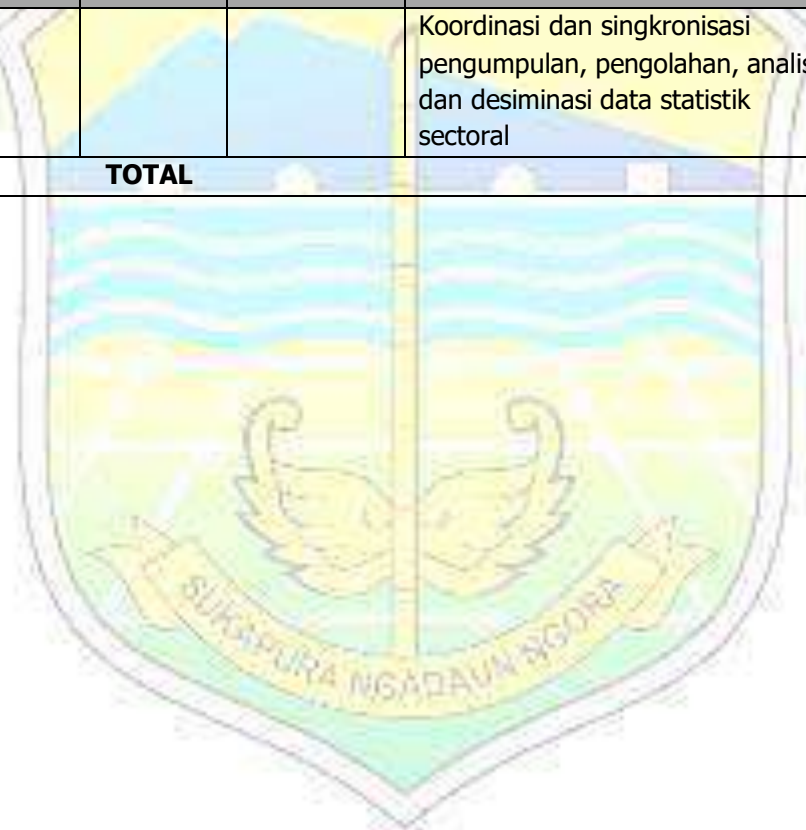
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	33.655.000	33.655.000	100
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	290.000.000	288.247.772	99,39
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20.000.000	19.935.000	99,67
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	446.194.350	443.535.300	99,40
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200.934.700	198.458.350	98,76

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	22.399.700	22.309.750	99,59
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200.460.250	200.407.800	99,97
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	22.399.700	22.359.400	99,82
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	450.750.000	431.320.415	95,68
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	206.875.000	194.399.008	93,96
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	18.500.000	18.499.500	99,99

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	206.875.000	199.922.507	96,63
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18.500.000	18.499.400	99,99
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	347.900.000	330.641.732	95,03
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	131.756.700	117.724.932	89,35
						Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	131.756.700	117.724.932	89,35

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	66.143.300	65.889.400	99,61
						Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	66.143.300	65.889.400	99,61
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	150.000.000	147.027.400	98,01
						Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	100.000.000	98.482.850	98,48
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.000.000	48.544.550	97,08
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	79%	83,33%	105,48%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	175.000.000	174.343.226	99,62
						Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	174.343.226	99,62

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sectoral	175.000.000	174.343.226	99,62
TOTAL							14.071.825.871	13.235.360.720	94,05



Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2022 pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda

Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda pada tahun 2022 sebesar 59,41 yang dinyatakan dalam predikat CC, artinya cukup, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk sistem. Nilai realisasi melebihi target tahun 2022 dengan persentase pencapaian 106,08%. Indikator ini ditunjang oleh sub kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	86.448.000	86.360.292	99,89
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.242.000	42.242.000	100
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	7.377.572.521	6.800.626.325	92,18
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	125

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	49.959.300	48.990.700	98,06
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.033.500	25.720.500	98,79
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.558.500	84.557.320	99,99
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	43.014.450	42.864.750	99,65

Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 paket	100
----------	---	----------	----------	-----

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.000.000	37.000.000	100
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Kunjungan Tamu	80.027.750	80.027.750	100
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	608.793.800	600.931.942	98,70
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	295.739.150	287.559.300	97,23
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	24 Unit	100

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	422.200.000	374.427.262	88,68
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	764.765.800	761.539.884	99,57
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	308.368.050	235.008.620	76,21
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	100

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.630.000	93.600.300	93,01

Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	100
----------	--	---------	---------	-----

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.580.000	50.128.200	95,33
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	100

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.803.900	151.110.733	98,24
Keluaran	Jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	100

2. Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten

Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten tahun 2021 yaitu sebesar 24,05 poin yang dinyatakan dalam predikat B, artinya akuntabilitas perencanaan kinerjanya baik. memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk sistem. Nilai sementara realisasi sudah mencapai target tahun 2022 dengan persentase pencapaian 100%. Hal ini disebabkan nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2022 baru dapat dilakukan penilaian pada awal bulan maret tahun 2023 oleh Kemenpan RB. Indikator ini ditunjang oleh kegiatan sebagai berikut

:

Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersusunnya Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	100.000.000	98.047.270	98,04
Keluaran	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	203.790.000	196.567.663	96,45
Keluaran	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya forum Konsultasi Publik	74.500.000	73.146.000	98,18
Keluaran	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	169.465.200	164.960.914	97,34
Keluaran	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100

Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksannya Musrenbang Kecamatan	34.859.900	33.850.279	97,10
Keluaran	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Rekap Usulan	1 Rekap Usulan	100

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	256.546.100	248.643.670	96,92
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 dokumen	4 dokumen	100

Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000	137.725.127	91,81
Keluaran	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan	1 Masukan	1 Masukan	100

Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	207.241.800	207.241.800	100
Keluaran	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	825 Orang	825 Orang	100

Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	200.000.000	191.809.187	95,90
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	5 Laporan	100

Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	149.999.800	133.476.498	88,98
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	228.187.000	225.517.989	98,83
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	33.655.000	33.655.000	100

	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
Keluaran	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	100

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	290.000.000	288.247.772	99,39
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20.000.000	19.935.000	99,67
Keluaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200.934.700	198.458.350	98,76
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	22.399.700	22.309.750	99,59
Keluaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200.460.250	200.407.800	99,97
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100

**Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	22.399.700	22.359.400	99,82
Keluaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100

**Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	206.875.000	194.399.008	93,96
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100

**Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	18.500.000	18.499.500	99,99
Keluaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	206.875.000	199.922.507	96,63
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18.500.000,00	18.499.400,00	99,99
Keluaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100

3. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder
 Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder yaitu sebesar 100%. Nilai realisasi telah mencapai target tahun 2022 dengan persentase pencapaian 100%. Hal ini menyatakan bahwa hasil kelitbangan telah ditindaklanjuti dan disosialisasikan kepada Perangkat Daerah dan Stakeholder. Indikator ini ditunjang oleh kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	131.756.700	117.724.932	89,35
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	66.143.300	65.889.400	99,61
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	100.000.000	98.482.850	98,48
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 dokumen	1 dokumen	100

Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	50.000.000	48.544.550	97,08
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 dokumen	1 dokumen	100

4. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yaitu sebesar 83,33%. Nilai realisasi telah melampaui target tahun 2022 dengan persentase pencapaian 105,48%. Namun ketersediaan data masih belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi dalam pemenuhan data statistik sektoral. Indikator ini ditunjang oleh kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	175.000.000	174.343.226	99,62
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	1 dokumen	1 dokumen	100

3.2. Realisasi Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana

dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan inefisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target. Efektifitas adalah perbandingan antara ratio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah daripada pencapaian output.

Pada tahun Anggaran 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 5 (Lima) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) Sub Kegiatan dengan dukungan anggaran Rp. 14.071.825.871,-. sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp)	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.533.736.721	9.802.695.878	93,06	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.690.000	128.602.292	99,93	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.448.000	86.360.292	99,89	100
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.242.000	42.242.000	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.453.565.321	6.875.337.525	92,24	100
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.377.572.521	6.800.626.325	92,18	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp)	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.959.300	48.990.700	98,06	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.033.500	25.720.500	98,79	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	853.394.500	845.381.762	99,06	100
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.558.500	84.557.320	99,99	100
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.014.450	42.864.750	99,65	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.000.000	37.000.000	100	100
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.027.750	80.027.750	100	100
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	608.793.800	600.931.942	98,70	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.739.150	287.559.300	97,23	100
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	295.739.150	287.559.300	97,23	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.186.965.800	1.135.967.146	95,70	100
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	422.200.000	374.427.262	88,68	100
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	764.765.800	761.539.884	99,57	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.381.950	529.847.853	86,10	100
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	308.368.050	235.008.620	76,21	100
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.630.000	93.600.300	93,01	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp)	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.580.000	50.128.200	95,33	100
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.803.900	151.110.733	98,24	100
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.546.402.800	1.485.468.408	96,06	100
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	839.161.200	815.215.796	97,14	100
18	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	100.000.000	98.047.270	98,04	100
19	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	203.790.000	196.567.663	96,45	100
20	Pelaksanaan Konsultasi Publik	74.500.000	73.146.000	98,18	100
21	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	169.465.200	164.960.914	97,34	100
22	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	34.859.900	33.850.279	97,10	100
23	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	256.546.100	248.643.670	96,92	100
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	357.241.800	344.966.927	96,56	100
24	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000	137.725.127	91,81	100
25	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	207.241.800	207.241.800	100	100
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	349.999.800	325.285.685	92,93	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp)	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
26	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	200.000.000	191.809.187	95,90	100
27	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	149.999.800	133.476.498	88,98	100
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.468.786.350	1.442.211.476	98.19%	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	571.842.000	567.355.761	99.21%	100
28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	228.187.000	225.517.989	98,83	100
29	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	33.655.000	33.655.000	100	100
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	290.000.000	288.247.772	99,39	100
31	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20.000.000	19.935.000	99,67	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	446.194.350	443.535.300	99,40	100
32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200.934.700	198.458.350	98,76	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp)	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
33	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	22.399.700	22.309.750	99,59	100
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200.460.250	200.407.800	99,97	100
35	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	22.399.700	22.359.400	99,82	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	450.750.000	431.320.415	95,68	100
36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	206.875.000	194.399.008	93,96	100
37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	18.500.000	18.499.500	99,99	100
38	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	206.875.000	199.922.507	96,63	100
39	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18.500.000	18.499.400	99,99	100
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	347.900.000	330.641.732	95,03	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	131.756.700	117.724.932	89,35	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp)	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
40	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	131.756.700	117.724.932	89,35	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	66.143.300	65.889.400	99,61	100
41	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	66.143.300	65.889.400	99,61	100
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	150.000.000	147.027.400	98,01	100
42	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	100.000.000	98.482.850	98,48	100
43	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.000.000	48.544.550	97,08	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	175.000.000	174.343.226	99,62	100
	Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	174.343.226	99,62	100
44	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sectoral	175.000.000	174.343.226	99,62	100
JUMLAH TOTAL		14.071.825.871	13.235.360.720	94,05	100

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKIP ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tasikmalaya dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tasikmalaya ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan laporan pengukuran kinerja terhadap Indikator Capaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, Rencana Kerja Perubahan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah



dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2022 dan Renstra dikategorikan BAIK. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2022 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Berikut pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja serta rata-rata capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	56 Poin	59,41 Poin	106,08%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	24,05 Poin	24,05* Poin	100%
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	79%	83,33%	105,48%
Rata-rata capaian kinerja					102,89%

Ket: *Capaian Sementara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pada Bappelitbangda secara umum tujuan, program/kegiatan maupun sasaran



telah dapat dicapai dengan baik dengan rata-rata capaian kinerja pada Bappeda sebesar 102,89%. Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta di dalamnya. Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator adalah walaupun untuk pencapaian target banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Bappelitbangda mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas Kinerja serta penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

